



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANTONIUS DWIJO PUTRANTO
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
3. NHK : 418971

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.186.005.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/109 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 1105 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 86.005.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 347.000.000

1. MOTOR, HONDA AFX12U21C07 M/T / SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.264.962



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

2.540.269.962

III. HUTANG

Rp.

671.567.616

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.868.702.346

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.